

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pa' Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Drs. M.Z. Arifin, M.Si.

Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UWGM Samarinda

Drs. M. Husni, M.AP.

Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UWGM Samarinda

Juli Weldisen

Mahasiswa Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UWGM Samarinda

Abstrak

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa serta kemampuan Kepala Desa sebagai Fasilitator, Mediator dan Motivator dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pa'Payak menjadi tuntutan masyarakat. Sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu berorientasi kepada kepentingan umum dan bekerja sama dengan pihak Pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat pembangunan desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif dengan analisis data secara induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Untuk menentukan informasi dilakukan dengan metode snowball sampling. Temuan dari penelitian ini bahwa Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, Mediator dan sebagai Motivator dalam pembangunan fisik. Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya hanya saja dalam melaksanakan perannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya agar pembangunan yang ada di Desa Pa'Payak sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu berorientasi kepada kepentingan umum.

Kata kunci: Peran Kepemimpinan, Kepala Desa, Pembangunan, Nunukan.

Abstract

The role of Village Leadership in Physical Development in the Village and the ability of the Village Head as a Facilitator, Mediator and Motivator in improving village development in Pa'Payak Village become the demands of the community. So it is expected that the implementation of village governance can be in accordance with the aspirations of the community, as well as increasing development that is always oriented to the public interest and cooperate with the Government to accelerate and accelerate the development of the village.

The type of research used is qualitative research, descriptive with data analysis inductively. Data collection is done by Interview, Observation, and Documentation research. To determine the information is done by snowball sampling method. Findings from this research that the Role of Village Leadership in Physical Development in Pa'Payak Village, Krayan Sub-district, Nunukan District is the Village Head's Role as Facilitator, Mediator and as a Motivator in physical development. The Village Head has performed his duties and functions only in implementing his role there are some obstacles so that the roads need to be drawn out so that the existing development in Pa'Payak village is in accordance with the aspirations of the community, and the improvement of development which is always be oriented to the public interest.

Kata kunci: Peran Kepemimpinan, Kepala Desa, Pembangunan, Nunukan.

1. Latar belakang

Proses pembangunan dapat pula dilihat dari pembangunan nasional, hal ini dapat dimengerti mengingat proses pembangunan nasional berarti pembangunan yang meliputi berbagai segi kehidupan masyarakat bangsa, baik bidang politik, pembangunan, ekonomi maupun hankam. Mengingat begitu besarnya ruang lingkup dari kegiatan pembangunan nasional ini, maka dalam pelaksanaannya diperlukan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah atau Negara sebagai pemegang kebijaksanaan pembangunan, dengan peran serta dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat mencapai sasarnya secara efektif dan efisien.

Sebagai suatu proses yang bersinambungan, pembangunan nasional disusun secara terencana, terarah dan terpadu dalam mewujudkan tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian pembangunan nasional diselenggarakan pemerintah yang dijabarkan dalam kegiatan yang bersifat operasional, untuk dilaksanakan oleh perangkatnya mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah secara keseluruhan di wilayah Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka diperlukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi pusat sampai ke daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah diharapkan mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah.

Salah satu unsur penting dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan yang berpusat di desa dalam arti pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan aris depan dalam pemerintahan Indonesia.

Daerah pedesaan merupakan daerah tempat persebaran kegiatan-kegiatan masyarakat seperti kegiatan pertanian dan juga kegiatan-kegiatan industri kecil dalam perkembangan sekarang ini, ekonomi Indonesia masih bertolak pada ekonomi pertanian dengan nilai potensial terbesar terletak di daerah pedesaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa yang telah direvisi dari undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam melaksanakan tugas pembangunan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut berkerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Sehingga Kepala Desa dan perangkat desa merupakan pelayan dan pengayom masyarakat yang mempunyai tipe kepemimpinan yang mana mampu mengundang partisipasi warga dalam memecahkan masalah melalui rembug desa. Kepala desa menjadi rujukan, baik masalah pribadi maupun kemasyarakatan, dan pada saat-saat kritis kepala desa dapat memberikan solusi damai bagi warganya.

Keberhasilan Kepala Desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di lingkungannya, maka seorang kepala desa

jugamengemban tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentukmenumbuhkan maupun mengembangkan semangat-semangat pembangunan.

Pelayanan yang baik mengandung unsur pengertian bahwa pelayanan lebihmenitik beratkan pada kualitas yang bermutu bagi masyarakat dan di dalamnyamengandung keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan. Artinya bahwapelayanan yang di berikan hendaknya bukan merupakan pelayanan yang bersifatadministrasi semata, tetapi juga memberikan pelayanan dalam arti luas, sepertipemberdayaan kepada masyarakat, membantuk masyarakat di dalam mengelolalingkungan, dan membangun serta mengembangkan potensi-potensi lokal yangada di desanya guna pelaksanaan pembangunan di desa.

Peran kepala desa tersebut juga dirasakan di Desa Pa' Payakkecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dari sisi kepemimpinan dalam pembangunan fisik dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Kepada Desa menjadi pengharapan masyarakat dalam memimpin proses pembangunan di desa.

1.1. Rumusan masalah

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yakni Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik DiDesa Pa'PayakKecamatan Krayan Kabupaten Nunukan?

1.2. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pembangunan fisik di Desasebagai Fasilitator, Mediator, dan Motivator di Desa Pa'PayakKecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

2. Kerangka teori

2.1. Peran

Menurut Soekanto (2006:243) peranan atau (role) merupakan aspekdinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dankewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peran tersebut merupakan apa yang harus dilakukan oleh seseorang gunamensahkan keberadaanya pada posisi tertentu. Dari definisi dapat disimpulkanperanan adalah suatu rangkaian perilaku seseorang, yang timbul berdasarkantindakan dan kemampuan seseorang untuk melakukan hak dan kewajibanberkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas dankewenangan yang diberikan oleh masyarakat.

Robin dan culter (2005: 66) mengungkapkan bahwa “peran merujuk keserangkaian pola perilaku yang diharapkan yang nempel pada seseorang yangmenduduki posisi tertentu pada unit sosial tertentu”. Sedangkan Katz dan Rosenzeweig (2007: 454) menyatakan konflik peranan tersebutada empat tipe :

- 1) Peranan orang yaitu sifat-sifat pribadi mengantarai peranan yang dikirim dengan peranan yang di terima oleh orang yang dituju. Konflik terjadi jika kebutuhan peranan itu bertentangan dengan kebutuhan, nilai, ataukemampuan dari orang yang dituju (focalperson).
- 2) Antara peranan yaitu berkaitan dengan fenomena multi sasaran untuk individu yang simultan bertindak dalam beberapa atau banyak organisasi.
- 3) Antar pengirim akan timbul apabila berbagai anggota dari setiap peranan mempunyai harpan yang berbeda-beda untuk perananorang tertentu sehingga menimbulkan pengiriman (sendings)yang bertentangan.
- 4) Dalam pengirim terjadi bila seorang pengirim menyampaikan intruksi yang bertentangan atau mengharapakan perilaku yang tidak mungkin menurut petunjuk sebelumnya.

Pemimpin yang memegang peran sangat besar diwajibkan bisamelaksanakan manajemen peran tersebut karena pemimpin itulah yang memegangpuncak peranan dalam suatu organisasi jika dihadapkan pada suatu konflik. Bukanhanya itu dalam dunia yang penuh dinamika dan perubahan

yang berlangsung dengan sangat cepat, manajer atau pemimpin memainkan peranan yang beranekaragam, tidak hanya peranan dalam organisasi tetapi juga interaksi diluar organisasi.

Lebih lanjut Yuliani dan Peronomo (2004:24) menyatakan bahwa Peranan seseorang di masyarakat dapat bermacam-macam. Karena peranan berkaitan dengan fungsi dan kedudukan seseorang dalam aktivitasnya sehari-hari, maka tanggung jawab dan kewajiban yang lekat padanya juga berbeda antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Namun demikian dalam keadaan dan situasi tertentu, tugas dan tanggung jawab seseorang berkaitan dengan peranannya di masyarakat dapat berubah. Hal ini disebabkan karena tuntutan dan keterlibatan langsung seseorang berkaitan dengan peranannya sangat mutlak adanya.

Menurut Muklas (2005:7) pada umumnya peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang mana dalam terjadinya suatu hal, kegiatan ataupun peristiwa dalam kehidupan masyarakat berdasarkan peraturan tertentu. Hal ini dapat diketahui bahwa peranan sebagai faktor dalam perilaku yang di harapkan bias menjadi baik dan menjadi jahat, dan peranan ini dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi dalam sebuah unit sosial.

Menurut Rivai (2006:58) peranan dapat di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam suatu organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana nanggung peranan berperilaku. Sehingga peranan dari pemimpin ini yang menentukan nasib untuk bawahannya.

Dalam pengertian diatas, dapat dimaksudkan bahwa keterlibatan seseorang atau kepala desa dalam aktivitas yang dilakukan program atau kelompok secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kondisi demikian keterlibatan peran secara tersebut berkaitan dengan kedudukan fungsi orang atau kepala desa tersebut. Dengan kata lain semakin tinggi kedudukan dan fungsi seseorang atau kepala desa dalam masyarakat maka akan tinggi pula peranan yang dituntut oleh masyarakatnya, begitu pula sebaliknya semakin rendah kedudukan dan fungsi seseorang atau kepala desa semakin rendah pula peranan yang dituntut masyarakat.

Sehingga dalam setiap peranan pasti akan selalu di tuntut partisipasi sebagai konsekuensi dan tanggung jawab kehadiran orang atau kepala desa tersebut ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan sangat berkaitan dengan dan kedudukan seseorang dalam masyarakat dan berdampak pula pada kewajiban dan hak yang melekat padanya.

2.2. Kepemimpinan

Menurut Fahmi (2014:68) kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan.

Selanjutnya menurut Amirullah dan Budiyo (2004 : 245) kepemimpinan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain (bawahan) melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi dan memberikan arah serta dapat mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.1. Peran pemimpin

Menurut Siagian (2010:48-70) terdapat lima peran pemimpin, yaitu :

- 1) Penentu arah, yaitu pemimpin menentukan arah tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemimpin merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang dilakukan secara terencana dan bertahap.
- 2) Wakil dan juru bicara organisasi, yaitu pemimpin berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam menjalin komunikasi dengan pihak atau instansi lain.
- 3) Komunikator, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai sasaran, strategi, tindakan atau keputusan yang diambil baik secara lisan maupun tertulis untuk

disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi

- 4) Mediator, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi, maupun lingkungannya tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar yang dihadapi maupun yang diatasi.
- 5) Integrator, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penyatu dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda pola pikir menuju pada tujuan bersama.

Berdasarkan penjelasan tentang kepemimpinan tersebut dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa:

- 1) Kepemimpinan meliputi penggunaan pengaruh dan bahwa semua hubungan dapat melibatkan pimpinan.
- 2) Kepemimpinan mencakup pentingnya proses komunikasi. Kejelasan dan keakuratan dari komunikasi mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya.
- 3) Kepemimpinan memfokuskan pada tujuan yang dicapai. Pemimpin yang efektif harus berhubungan dengan tujuan-tujuan individu, kelompok dan organisasi.
- 4) Pemimpin menentukan dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan situasi konflik yang timbul dalam suatu organisasi maupun lingkungannya.

2.2.2. Tipe kepemimpinan

Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Suwatno (2013:156) mengemukakan tentang tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut:

1) Kepemimpinan Pribadi (Personal Leadership)

Dalam tipe ini pimpinan mengadakan hubungan langsung dengan bawahan, sehingga timbul hubungan pribadi yang intim.

2) Kepemimpinan Non-Pribadi (Non-Personal Leadership)

Dalam tipe ini pimpinan tidak mengadakan hubungan langsung dengan bawahannya, sehingga antara atas dan bawahan tidak timbul kontak pribadi. Hubungan antara pimpinan dengan bawahannya melalui perencanaan dan instruksi-instruksi tertulis.

3) Kepemimpinan Otoriter (Authoritarian Leadership)

Dalam tipe ini pimpinan memperlakukan bawahannya secara sewenang-wenang, karena menganggap diri orang paling berkuasa, bawahannya digerakkan dengan jalan paksa, sehingga para pekerja dalam melakukan pekerjaannya bukan karena ikhlas melakukan pekerjaannya, melainkan karena takut.

4) Kepemimpinan kepatuhan (Paternal Leadership)

Dalam tipe ini pimpinan memperlakukan bawahannya seperti anak sendiri, sehingga para bawahannya tidak berani mengambil keputusan, segala sesuatu yang pelik diserahkan kepada bapak pimpinan untuk menyelesaikannya. Dengan demikian bapak sangat banyak pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab anak buahnya.

5) Kepemimpinan Demokrasi (Democratic Leadership)

Dalam tipe ini pimpinan selalu mengadakan musyawarah dengan para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya yang sukar, sehingga para bawahannya merasa dihargai pikiran-pikirannya dan pendapat-pendapatnya serta mempunyai pengalaman yang baik di dalam menghadapi segala persoalan yang rumit. Dengan demikian para bawahannya bergerak itu bukan karena rasa paksaan, tetapi karena rasa tanggung jawab yang timbul karena kesadaran atas tugas-tugasnya.

6) Kepemimpinan bakat (Indigenous Leadership)

Dalam tipe ini pimpinan dapat menggerakkan bawahannya karena mempunyai bakat untuk itu, sehingga para bawahannya senang mengikutinya, jadi tipe ini lahir karena pembawaannya sejak lahir seolah-olah ditakdirkan untuk memimpin dan diikuti oleh orang lain. Dalam tipe ini pemimpin tidak akan susah menggerakkan bawahannya, karena parawawahannya, karena para bawahannya akan selalu menurut akankehendaknya

2.2.3. Jenis Kepemimpinan

1) Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan ini berfokus pada transaksi antar pribadi, ada dua karakteristik yang melandasi kepemimpinan transaksional yaitu:

- a. Para pemimpin menggunakan penghargaan kontingensi untuk memotivasi.
- b. Para pemimpin melaksanakan tindakan korektif hanya ketika parawawahan gagal mencapai tujuan.

2) Kepemimpinan Kharismatik

Kepemimpinan ini menekankan perilaku pemimpin yang simbolis, pesan-pesan mengenai visi dan memberikan inspirasi, komunikasi non verbal, daya tarik terhadap nilai-nilai ideologis, stimulasi intelektual, terhadap para pengikut oleh pemimpin.

3) Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif dengan masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang tumbuh dan meningkat.

4) Kepemimpinan Tim

Menjadi pemimpin efektif harus mempelajari keterampilan seperti kesabaran untuk membagi informasi, percaya kepada orang lain, menghormati otoritas dan memahami kapan harus melakukan intervensi.

2.2.4. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan menurut House Robbins dalam Suwatno dan Donni Juni Priansa (2013:158) antara lain:

1) Kepemimpinan Direktif

Kepemimpinan ini membuat bawahan agar tahu apa yang diharapkan pimpinan dari mereka, menjadwalkan kerja untuk dilakukan, dan memberibimbingan khusus mengenai bagaimana menyelesaikan tugas.

2) Kepemimpinan yang Mendukung

Kepemimpinan ini bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan bawahan.

3) Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan ini berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran mereka sebelum mengambil suatu keputusan.

4) Kepemimpinan berorientasi prestasi

Kepemimpinan ini menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka.

2.3. Kepala Desa

Sumber Wikipedia Bahasa Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari pendapat membuat peraturan desa atau pun dalam mengambil suatu keputusan dimana dalam mencapai suatu kesepakatan yang sempurna kepala desa harus meminta pendapat dari

masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan permusyawaratan desa. Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah pembangunan yang dilakukan dalam wilayah yang dipimpinnya yaitu desa, hal ini dapat dikatakan demikian, karena kepala desa yang memegang kendali perubahan dalam pembangunan desa, yang dimana kepala desa sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa pimpinan tertinggi dalam desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 3 mengatakan, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-undang di atas juga dapat disimpulkan bahwa kepala desa sebagai pimpinan dan memiliki otoritas serta berhak memiliki perangkat pendukung terlaksananya pembangunan desa.

2.3.1. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Menurut Undang-undang Nomor. 06 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Maka dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan, bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Desa, menyebutkan Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desanya. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembantuan dari pemerintah, provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten. Menerangkan wewenang Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum dan mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas disimpulkan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengarahan dan pemanfaatan potensi desa dan daya yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan kegiatan pembangunan pedesaan.

Dengan bertindak adil, tidak diskriminatif, tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan seorang kepala desa dapat dikatakan berperan dalam penyelenggaraan pembangunan desa berdasarkan kebijakan yang ada.

Seorang Kepala Desa pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan desa lainnya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing

serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta masyarakat menggunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

2.3.2. Fungsi Kepala Desa

Menurut Simandjuntak (2000:3) mengemukakan sebagai berikut; “fungsi adalah besaran yang berhubungan atau besaran yang berubah”. Musanel (2004:10) menjelaskan, “yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu.”

Selanjutnya, Siagian (2006:155) mengemukakan, secara singkat dapat dikatakan bahwa “fungsi dari seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya ialah mengelola pemerintahan desa yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan, yaitu baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dengan tugas yang dipercayakan itu, kepada desa tentunya dibantu oleh perangkat desa dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut A. W. Widjaja (1996:22) menyatakan bahwa fungsi-fungsi kepala desa tersebut adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangganya sendiri.
- 2) Mengerakan partisipasi masyarakat.
- 3) Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya.
- 4) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pemerintah di atasnya.

Peran Kepala Desa sangatlah penting dalam pembangunan desa, yaitu Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangga dan sumber-sumber keuangan desa dalam perencanaan pembangunan di desanya. Adapun Peran Kepala Desa Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai fasilitator

Yang dimaksud dengan peran kepala desa dalam pembangunan sebagai fasilitator tindakan kepala desa dalam menyediakan kebutuhan yang di perlukan dalam proses pembangunan secara bertanggung jawab secara fisik sehingga memudahkan aktivitas yang berlangsung.

Menurut Wayan Mahayana (2013:400) sebagai “fasilitator merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan program-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya”.

b. Sebagai mediator

Sedangkan sebagai mediator yaitu aktivitas yang dimainkan kepala desa selaku penengah atau perantara dalam suatu perselisihan untuk memperoleh penyelesaian masalah yang terjadi selama proses pembangunan berlangsung di tengah masyarakat.

Menurut John W. Head (2009:114) “mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri”. Dari definisi tersebut, mediator dianggap sebagai “kendaraan” bagi para pihak untuk berkomunikasi. Mediator tidak akan ikut campur dalam menghasilkan putusan. Oleh sebab itu dapat diduga bahwa putusan yang dihasilkan melalui mediasi akan permanen dan menyenangkan pihak-pihak yang telah mengakhiri perselisihan.

Menurut Hermansyah, (2015:356), “sebagai seorang mediator yang sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang direncanakan”. Oleh karena itu fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplimentasikan oleh seorang Kepala Desa sebagai perantara dan meliputi beberapa aspek yaitu:

- 1) Kepala Desa bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik.
- 2) Desa bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

c. Sebagai motivator

Motivator adalah bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin dalam pembangunan secara bertanggung jawab dalam memberikan dorongan semangat untuk mencapai harapan bersama dalam pembangunan. Menurut G.R. Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan (2005:145) mengemukakan bahwa "motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.

Motivasi itu tampak dalam dua segi yang berbeda, yaitu dilihat dari segi aktif/dinamis, motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan, mengerahkan, dan mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja, agar secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan apabila dilihat dari segi pasif/statis, motivasi akan tampak sebagai kebutuhan sekaligus sebagai perangsang untuk dapat menggerakkan, mengerahkan, dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan".

2.4. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan merupakan suatu yang ingin dicapai semua kalangan baik itu masyarakat maupun pemerintah, pembangunan juga merupakan sesuatu daya upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari yang buruk menjadi lebih baik. Dengan mendaya gunakan segala sumber daya yang ada pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep pembangunan dapat dijelaskan oleh beberapa ahli, Johan Galtung (2007:25) mengatakan bahwa Pembangunan merupakan suatu upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial.

Bintoro Tjokroamidjojo (2007:93), mengemukakan pengertian pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Nugroho dan Rochmin Dahuri dalam Sadu (2002:157) mengemukakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, dalam Sadu 2002:157).

Menurut Saul M. Katz yang dikutip oleh Teguh Yuwono (2001:4) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Pandangan lain datang dari Siagian (2000:4) menyatakan “pembangunan biasanya didefinisikan sebagai serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Hal ini terlihat dari adanya pembentukan organisasi lokal termasuk didalamnya lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas masalah administrasi atau suatu bentuk lembaga masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sosial.

Demikian pula dengan adanya dorongan yang kaitannya tetap pada konsep “selfhelp” (swadaya) dengan dasar pengertian bahwa pembangunan sumber daya lokal serta khususnya kenyataan bahwa semua bentuk kegiatan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, akan memperkuat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang mampu bertahan.

Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tidak mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan asas prioritas dan suatu tahapan tertentu seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan diberbagai, perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan diberbagai Negara Indonesia mengalami pengeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif dan model pembangunan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu usaha pembubuhan dan perubahan yang perencanaan dilakukan secara sadar oleh suatu daerah menuju modernisasi, model pembangunan yang mewakili modernisasi adalah model pembangunan yang mengarah kepada pertumbuhan. Salah satu unsur pembangunan dalam masyarakat adanya keinginan-keinginan yang dilaksanakan harus dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan pandangan-pandangan ataupun cita-cita yang optimis sifatnya. Pandangan-pandangan ataupun cita-cita tersebut pada umumnya diwujudkan dalam rangka untuk mencapai tahap kehidupan tahapan kehidupan materi dan spiritual yang baik daripada keadaan yang ingin dicapai, mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat hidup sederajat dengan masyarakat yang lainnya, akan tetapi usaha untuk mengadakan pembangunan tersebut tidak semudah yang diduga. Seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Teguh Yuwono (2001:54) bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses.

2.5. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Pa' Payak. Setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana di Desa Pa' Payak.

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula dengan informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan fisik.

Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

2.6. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa sebagai fasilitator, mediator, dan motivator.

3. Metode

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penjabarandeskriptif.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara dalam pengumpulan data dengan pemilihan informan dipilih secara purposive sampel (penunjukan).

3.3. Teknik Analisis Data

Menggunakan analisis interaktif dari Miles and Huberman yang meliputi: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. Temuan dan pembahasan

4.1. Gambaran Wilayah Penelitian

4.1.1. Kecamatan Krayan

Kecamatan Krayan adalah salah satu kecamatan yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Terletak antara 115° BT – 116° BT dan 3° LU – 4° LU, wilayahnya seluas 3.114,20 km² Long Bawan adalah ibukota Kecamatan Krayan. Wilayah Kecamatan Krayan memiliki bentang alam berupa dataran tinggi, rawa, perbukitan dan pegunungan dengan rata-rata ketinggian 1.500 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Krayan merupakan persawahan dan hutan. Sebagian wilayah Kecamatan Krayan berada di Taman Nasional (TN) Krayan Mentarang. Pengelolaan Taman Nasional Krayan Mentarang (TNKM).

Satu-satunya akses ke Kecamatan Krayan dari kota-kota di Indonesia adalah menggunakan transportasi udara. Ada dua maskapai yang melayani penerbangan dari Kota Malinau, Kota Tanjung Selor, Kota Tarakan dan Kota Nunukan ke Long Bawan, yaitu Maf dan Susi Air. Jika menggunakan transportasi udara, waktu tempuh dari Kota Malinau ke Long Bawan adalah 45 menit dan dari Kota Tarakan ke Long Bawan adalah 1 jam. Sementara jika melalui Malaysia, Long Bawan bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi darat. Ada empat pintu masuk di perbatasan Malaysia dan Indonesia, yaitu Long Midang, Long Layu, Lembudud dan Tanjung Karya.

Jumlah kepala keluarga di kecamatan krayan adalah 3.945 KK, atau total 15.228 jiwa. Jumlah laki-laki adalah 7.949 jiwa dan jumlah perempuan adalah 7.279 jiwa. Batas-batas wilayah kecamatan krayan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah, Malaysia.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krayan Selatan dan Kabupaten Malinau.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak, Malaysia.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

4.1.2. Desa Pa'Payak

Sejarah Desa Pa'Payak, tidak terlepas dari adat istiadat Dayak Lun Daye yang melekat sejak dahulu, yang pada umumnya tinggal di rumah panjang dan mereka menetap di suatu daerah yang namanya Pa'Payak. Sejarah Desa Pa'Payak, tidak terlepas dari adat istiadat Dayak Lun Daye yang melekat sejak dahulu, yang pada umumnya tinggal di rumah panjang dan mereka menetap di suatu daerah yang namanya Pa'Payak.

Berdasarkan data statistik Kecamatan Krayan 2016 bahwa jumlah penduduk di Desa Pa'Payak menurut jenis kelamin laki-laki berjumlah 107 jiwa sedangkan jumlah perempuan yang berjumlah 105 jiwa. Masyarakat Desa Pa' Payak Kecamatan Krayan. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan dan bekerja sebagai Petani sawah, hal ini dikarenakan wilayah Desa Pa' Payak termasuk wilayah pedesaan sehingga sebagian besar berprofesi sebagai Petani, sebagian PNS dan di bidang pedangang .

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Peran kepala desa sebagai fasilitator

Kepala Desa telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik untuk memimpin pemerintahan desa pa' payak dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pembangunan Kepala Desa berperan sebagai fasilitator untuk melaksanakannya karena pelaksanaan pembangunan merupakan tugas dari kepala desa yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Pa' Payak ini sudah cukup dirasakan oleh masyarakat baik itu pembangunan fisik. Peran Kepala Desa dalam pembangunan sebagai fasilitator adalah tindakan Kepala Desa dalam menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan secara bertanggung jawab secara fisik sehingga memudahkan aktivitas yang berlangsung didalam kehidupan masyarakat desa pa'payak.

4.2.2. Peran kepala desa sebagai mediator

Peran Kepala Desa sebagai mediator di pemerintahan desa ini sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat pada waktu Kepala Desa menyelesaikan konflik antara masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Terkadang permasalahan yang diselesaikan oleh Kepala Desa tidak ada dukungan dari masyarakat sehingga permasalahan tersebut harus dibawa keranah hukum baik itu Hukum Adat dan Hukum Negara. Tidakan Kepala Desa Pa'Payak ini dalam menyelesaikan masalah atau konflik didalam masyarakat tindak terlepas dengan perundang-undang yang berlaku khususnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sesuai dengan tugas dan fungsi kepala desa.

Dalam menyelesaikan sesuatu masalah apabila dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab didukung dengan komponen-komponen lain, misalnya adadukungan dari masyarakat, sarana dan prasarana, kondisi yang kondusif dan lingkungan yang memungkinkan, maka pembangunan desa yang diprogramkan oleh pemerintah dan yang diharapkan oleh masyarakat akan berjalan secara efektif, efisien serta maksimal. Oleh sebab itu kalau dukungan tersebut sudah memadai, maka harus terjalin hubungan yang harmonis antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) atau yang diidentikkan sebagai badan perwakilan masyarakat yang berada di tingkat desa. Kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di tingkat desa harus memainkan peranan secara maksimal, agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

4.2.3. Peran kepala desa sebagai motivator

Peran kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di desa pa' payak sudah teraksanacukup baik terlihat dari berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat untuk pembangunan fisik dapat dilihat antaramasyarakat dalam mengikuti kegiatan pembangunan fisik yang diadakan oleh pemerintah desa. Proses dan strategi komunikasi yang dijalankan kepala desa berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sesuai dengan tugas dan fungsi kepala desa.

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjoldan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi contoh teladan dan panutan bagi masyarakat agar mereka dapat berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjalin kerja samayang baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan

padakenyataan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah desa akan sangat ditentukan oleh sosok kepala desa sebagai figure pemimpin pemerintah desa. Seorang kepala desa harus dapat menggerakkan sumber daya manusia untuk dapat mencapai keberhasilan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu paradigma pembangunan melainkan menjadi pelaku pembangunan dengan peran kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk swadaya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan peranannya sebagai motivator pembangunan serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik di desa.

Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam berbagai bentuk swadaya, yaitu swadaya ide, dana, tenaga, dan material pembangunan merupakan keberhasilan bahwa betapa pentingnya kebersamaan dalam pembangunan.

5. Kesimpulan

- a. Sesuai dengan tugas kepala desa sebagai fasilitator di masyarakat baik dan lancar, meskipun masih terdapat kendala-kendala dalam hal pelaksanaannya.
- b. Peran kepemimpinan kepala desa sebagai mediator dalam menggerakkan masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di desa pa'payak sudah terlaksana cukup baik terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan dan hasil-hasil pembangunan fisik.
- c. Peran kepemimpinan kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk swadaya. Kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai motivasi pembangunan serta aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik di desa.
- d. Dalam menjalankan peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih terkendala cara berkoordinasi antar aparat, lembaga desa dan masyarakat. Sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan di desa pa'payak kecamatan krayan kabupaten Nunukan.

Daftar referensi

- AMIRULLAH, DAN HARIS BUDIYONO. 2004 Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- ANONIM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah.
- ANONIM, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang desa.
- AW. WIDJAJA, 1993, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- BINTOROTJOKROAMIDJOJO, 2007. Perilaku dan Pengembangan Organisasi. Agritek YPN dan SOFA Press: Malang
- IRHAM FAHMI. 2014. Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi dan Kasus. Alfabeta : Bandung.
- KHAIRUDDIN, 2002. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- KOENTJARANINGRAT. 2001. Masyarakat Desa Di Indonesia Masa Ini. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- LEXY. J. MOLEONG, 2000, Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rusada Karya: Bandung.
- PURNOMO SETADY AKBAR USMAN, 2003. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- ROBBIN DANCOULTER. 2005. Manajemen. PT. INDEKS. Jakarta.
- SADU WASISTIONA, 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alqa, Jakarta.
- SONDANG P. SIAGIAN, 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- SONDANG P. SIAGIAN, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Penerbit: rineka cipta.
- SOERJONO SOEKANTO. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada
- SUGIYONO. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods), Penerbit : Alfabeta, cv. Bandung.
- SUHARSIMIARIKUNTO, 2005.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- SUWATNO DAN DONNI JUNI PRIANSA. 2013. MANAJEMEN SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Penerbit : ALFABETA, cv. Bandung.
- VEITHZAL RIVAI, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perubahan : dari Teori Ke Praktik, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- YUWONO TEGUH, 2001, Manajemen Otonomi Daerah Berdasarkan Pradigma Baru,Clogapps Diponegoro University: Semarang.

---***---